

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Sistem Keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standart kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya sistem keuangan Indonesia digolongkan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang termasuk dalam perbankan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai salah satu lembaga keuangan perantara (*intermediary financial institution*), bank konvensional dan bank syariah mempunyai fungsi yang sama, yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Meskipun mempunyai fungsi yang sama, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang paling mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah dalam hal prinsip dan perangkat yang digunakan. Jika bank konvensional lebih menekankan pada prinsip bunga bank, maka bank syariah menganggap bunga bank sebagai sesuatu yang haram untuk dilakukan karena dianggap riba. Sebagai pengganti bunga bank yang dianggap riba dan haram ini, maka pihak bank syariah lebih menekankan prinsip bagi hasil antara nasabah dan bank serta lebih menekankan jual beli dan sewa sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Salah satu bank konvensional yang cukup terkenal adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), BCA didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central

Asia NV sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup perusahaan rokok terbesar di dunia, Djarum. Sebagai bank konvensional swasta terbesar di Indonesia BCA melihat minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah pesat dalam beberapa tahun terakhir. BCA berusaha memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah dengan mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang kemudian menjadi PT. Bank BCA Syariah (BCA Syariah). Bank yang tidak menggunakan sistem bunga seperti di bank konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Layaknya lembaga keuangan secara umum, BCA Syariah juga memiliki peran dan fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas BCA Syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Salah satunya adalah simpanan *mudharabah* yang terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Meningkatnya dana pihak ketiga BCA Syariah setiap tahunnya dikarenakan perbankan syariah di Indonesia mampu menarik minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah, hal tersebut dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah beragama Islam, sehingga bank syariah merupakan solusi untuk masyarakat yang ingin berinvestasi di bank tanpa memperoleh bunga yang merupakan riba, tetapi dengan sistem bagi hasil.

Pada dasarnya sistem atau tatanan dalam perekonomian suatu negara mempunyai peranan penting dalam penyediaan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan serta lembaga penunjang lainnya. Dalam menjalankan operasionalnya, terdapat beberapa faktor yang juga membawa pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih investasi atau jasa perbankan yang akan digunakan. Salah satunya adalah inflasi, dimana inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Tingginya harga dan pendapatan yang tetap atau pendapatan meningkat sesuai dengan besarnya inflasi membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan.

Inflasi merupakan fenomena moneter yang selalu menjadi perhatian utama bank sentral atau otoritas moneter. Pasalnya, inflasi yang tidak terkendali akan menggerus daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga kesejahteraan masyarakat menurun. Secara umum setiap negara menginginkan terciptanya laju inflasi yang rendah dan stabil. Pada tingkat yang rendah dan stabil, inflasi memberikan efek positif bagi perekonomian. Konsumen lebih mudah melakukan perencanaan konsumsi dan tergerak manabung karena daya beli tidak akan tergerus oleh inflasi. Inflasi yang rendah umumnya dibarengi suku bunga yang rendah, sehingga mendorong dunia usaha berinvestasi untuk peningkatan produksi yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi menimbulkan ketidakpastian sehingga mengurangi insentif untuk investasi dan konsumsi serta menggerus daya saing ekspor domestik. Masyarakat kelas bawah merupakan golongan yang paling rentan terhadap inflasi karena pergerakan upah mereka relatif lamban.

Kenaikan harga barang secara keseluruhan yang sering kita sebut sebagai inflasi memiliki dampak yang kuat terhadap perekonomian. Kenaikan harga barang dapat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup banyak, kelangkaan sumber daya yang akan menyebabkan naiknya impor barang tersebut, dan masih banyak lagi sebab yang lainnya. Kebijakan pemerintah di dalam mengendalikan inflasi diantaranya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga.

Menurut Dornbus dan Fischer dalam nandadipa (2010:57) menyebutkan dampak inflasi antara lain: menimbulkan gangguan fungsi uang, melemahkan semangat menabung, meningkatkan kecenderungan untuk belanja, pengerukan tabungan dan penumpukan uang serta penumpukan kekayaan. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi tahun 2016, 2017, dan 2018 tanggal 21 Mei 2014 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2016 – 2018, masing-masing sebesar 4%, 4% dan 3,5% masing-masing dengan deviasi $\pm 1\%$. (Bank Indonesia, 2017)

Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor utama penerapan nilai BI Rate adalah inflasi. Penetapan BI Rate akan tergantung dari naik turunnya inflasi tersebut. Jika inflasi naik, Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate. Sebaliknya, jika inflasi turun, Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate. Dengan ditetapkannya BI Rate, Bank Indonesia berharap bisa memberikan stimulus kepada lembaga perbankan untuk mengikuti skenario yang ditetapkan Bank Indonesia. Misalnya, dengan menurunkan BI Rate, Bank Indonesia (BI) berharap lembaga perbankan akan menurunkan suku bunga deposito dan kredit. Begitu pula sebaliknya, jika Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate, lembaga perbankan diharapkan ikut menaikkan suku bunga deposito dan kredit. Diharapkan dengan sedikitnya uang yang beredar di masyarakat, inflasi perlahan-lahan akan turun. Dengan demikian, kondisi finansial secara umum akan menjadi stabil dan Bank Indonesia (BI) bisa menurunkan BI Rate. Lembaga perbankan yang sempat membatasi pemberian pinjaman kembali membuka peluang pemberian pinjaman bagi masyarakat. Dengan demikian, banyak usaha/UKM baru yang lahir dan banyak lowongan pekerjaan yang tersedia. Perekonomian pun dengan sendirinya bertumbuh.

Negara yang inflasinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Negara lain maka nilai mata uangnya akan cenderung melemah (relative inflation rate). Ketika harga produk dalam negeri mengalami peningkatan maka masyarakat akan cenderung untuk mencari alternatif tawaran dari Negara lain yang lebih murah. Akibatnya kurs mata uang dalam negeri akan melemah seiring dengan penurunan permintaan akan mata uang dalam negeri. Permintaan mata uang asing akan meningkat seiring dengan peningkatan produk dari Negara lain. Itulah sebabnya

mengapa Negara yang inflasinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Negara lain maka nilai mata uangnya akan cenderung melemah.

Tabel 1.1

Tahun	Dana Pihak Ketiga dalam Milyar Rupiah ¹⁾		Data ²⁾		
	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank BCA Syariah	Inflasi(%)	Kurs (Rp)	BI Rate(%)
2010	277.531	96,61	6,96	9.086,85	6,5
2011	323.428	148,53	3,79	8.776,01	6,58
2012	370.274	1.261,80	4,3	9.384,52	5,77
2013	409.486	1.703,00	8,38	10.459,62	6,48
2014	447.906	2.338,70	8,36	11.869,15	7,54
2015	473.666	3.255,20	3,35	13.279,60	7,52
2016	530.134	3.842,30	3,02	13.308,29	6,79
2017	581.183	4.736,40	3,61	13.548,00	4,25

Data Dana Pihak Ketiga PT Bank Central Asia Tbk) dan PT Bank BCA Syariah, serta Inflasi, Kurs, dan BI Rate periode 2010-2017.

Sumber:

- 1) Laporan Keuangan BCA dan BCA Syariah, 2010-2017
- 2) Bank Indonesia, 2010-2017

Dari tabel 1.1, terlihat kondisi Inflasi yang naik secara signifikan di tahun 2013 menjadi 8,38% dari inflasi tahun sebelumnya sebesar 4.30% dan diikuti dengan kenaikan Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan BI Rate menjadi 6,48%, hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam penempatan dananya di bank syariah karena akan bersaing dengan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh bank konvensional dalam memberikan imbalan bunga tabungan kepada masyarakat dalam penghimpunan dana pihak ketiga.

Inflasi yang secara signifikan meningkat di tahun 2013 diikuti oleh kenaikan nilai kurs dan BI Rate yang tinggi. Tetapi kenaikan ini berdampak positif terhadap DPK yang lebih meningkat dari tahun 2012 ke 2013.

Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak terlepas dengan adanya perkembangan ekonomi di Indonesia secara makro. Variabel makro tersebut seperti inflasi, kurs, dan BI Rate. Tetapi di setiap tahunnya jumlah DPK Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terus

mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan bank syariah mampu memberikan pelayanan yang baik dan jaringan kantor yang luas.

Dana pihak ketiga merupakan salah satu penunjang bagi bank konvensional maupun bank syariah serta unit usaha syariah dalam menjalankan operasionalnya. DPK menjadi sangat penting untuk terus meningkatkan eksistensi perbankan di Indonesia. Besarnya jumlah dana pihak ketiga di perbankan juga di pengaruhi oleh pelayanan dari bank, jaringan kantor yang luas serta di pengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menimbulkan permasalahan yang cukup rumit yang telah membuat perekonomian Indonesia yang semula mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan terjadinya Inflasi. Krisis ekonomi ini juga membuat sistem Perbankan menjadi rapuh karena nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS yang merosot tajam, kondisi ini yang menyebabkan lembaga perbankan terus menerus merugi dan modalnya semakin terkuras yang pada akhirnya berakibat pada likuidasi sejumlah bank. Kebijakan pemerintah untuk terus menjaga kesinambungan fiskal serta komitmen Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan memperkuat sistem perbankan memberikan dampak positif bagi arah perkembangan perekonomian

Dalam penelitian ini, penulis memilih PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank BCA Syariah sebagai bagian dari perbankan yang akan diteliti karena BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang memiliki kemajuan relatif tinggi pasca restrukturasi perbankan nasional serta pulihnya dana pihak ketiga seperti pada tingkat sebelum krisis. Penulis menggunakan variabel independen inflasi, nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, dan *BI Rate*. Variabel dependen yaitu Dana Pihak Ketiga PT Bank Centra Asia Tbk dan PT Bank BCA Syariah. Periode penelitian yang digunakan dari tahun 2010 sampai 2017, karena di tahun 2013 merupakan terjadinya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS yang melemah, inflasi yang tinggi, sehingga Bank Indonesia menaikkan suku bunga atau *BI Rate* menjadi 6,48%.

Berdasarkan latar belakang diatas, judul yang diangkat dari penelitian ini adalah “ **Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga Pada PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank BCA Syariah Periode 2010-2017**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Central Asia Tbk?
2. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Central Asia Tbk?
3. Apakah Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Central Asia Tbk?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada PT Bank BCA Syariah?
5. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada PT Bank BCA Syariah?
6. Apakah Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada PT Bank BCA Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh Inflasi, *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank BCA Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Pengembangan disiplin ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan tambahan literatur yang dapat memperkaya pengembangan ilmu sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan moneter dan perbankan di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan investasi dana dalam sektor industri Perbankan. Dan memberikan gambaran mengenai pengaruh Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga dalam Perbankan konvensional dan syariah di Indonesia.

4. Bagi Perbankan di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi bank-bank di Indonesia dalam melakukan operasinya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi penghimpunan dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK).

5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang berkaitan dengan fungsi bank dalam menghimpun dana masyarakat.